



PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR NOMOR : 07 TAHUN 2004

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI KANTOR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR

- Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan pasal 11 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, dipandang perlu menetapkan pembentukan Organisasi Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tanjung Jabung Timur dalam suatu Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
4. Undang-undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3903);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 07 Tahun 2003 tentang Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Dengan Persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR**

M E M U T U S K A N

**MENETAPKAN : PEMBENTUKAN ORGANISASI KANTOR SATUAN POLISI
PAMONG PRAJA KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- b. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah Otonomi lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
- c. Bupati ialah Bupati Tanjung Jabung Timur;
- d. Sekretaris Daerah ialah Sekretaris Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- e. Kantor adalah Kantor Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- f. Kepala Kantor adalah Kepala Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok yang terdiri dari tenaga Fungsional dan bertugas melakukan kegiatan teknis di lingkungan Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan Jabatan Non Struktural yang melaksanakan tugas berdasarkan bidang keahlian.

**BAB IX
PEMBENTUKAN**

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk lembaga :
Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tanjung Jabung Timur

**BAB III
KEDUDUKAN**

Pasal 3

- (1) Kantor Satuan Polisi Pamong Praja merupakan unsur penunjang Pemerintah Kabupaten;
- (2) Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

**BAB IV
TUGAS POKOK FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI**

Pasal 4

Kantor Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten dan melaksanakan Kewenangan Otonomi Daerah dibidang Satuan Polisi Pamong Praja.

Pasal 5

Dalam melakukan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Kantor Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang Satuan Polisi Pamong Praja;
- b. Pelayanan penunjang penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dibidang Satuan Polisi Pamong Praja.

Pasal 6

(1) Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja terdiri dari :

- a. Kepala Kantor;
- b. Sub Bagian Tata Usaha;
- c. Seksi Operasional Ketentraman dan Ketertiban;
- d. Seksi Pembinaan Masyarakat dan Hubungan Kerja Sama;
- e. Seksi Pengawasan dan Penyidikan;
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Organisasi Kantor Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB V KEWENANGAN

Pasal 7

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 5, Kantor Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai Kewenangan sebagai berikut:

- a. penyusunan pedoman dan petunjuk operasional penerbitan Perda Kabupaten dan Keputusan Bupati serta Peraturan Perundang-undangan lain yang berlaku;
- b. penyusunan program kegiatan pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat;
- c. pembinaan dalam rangka pengembangan kapasitas yang meliputi pembinaan personil ketatalaksanaan sarana dan prasarana kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten;
- d. koordinasi pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat sesuai dengan program, pedoman dan petunjuk teknis;
- e. pelaksanaan urusan ketatalaksanaan, perlengkapan, kepegawaian, keuangan dan rurnah tangga;
- f. evaluasi peiaksanaan tugas dan pelaporan.

BAB VI ESELONNERING KANTOR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Pasal 8

Eselonnering bagi pejabat pada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja adalah :

- a. Kepala Kantor adalah Eselon III.a;
- b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha adalah Eselon IV.a;
- c. Kepala Seksi adalah Eselon IV.a.

BAB VII TATA KERJA

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan unit organisasi dilingkungan Kantor dan Kelompok tenaga fungsional wajib menerapkan prinsip Koordinasi, Integrasi dan Sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten serta dengan Instansi lain diluar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 10

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 11

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.

Pasal 12

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

Pasal 13

Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 14

Dalam melaksanakan tugas. setiap pimpinan organisasi dibantu oleh satuan organisasi dibawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing wajib mengadakan rapat berkala.

BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 15

Uraian tugas dari masing-masing jabatan struktural pada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tanjung Jabung Timur Kabupaten Tanjung Jabung Timur akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 16

Pemangku jabatan yang ada pada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tanjung Jabung Timur setelah ditetapkannya Peraturan Daerah ini akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati sesuai dengan kebutuhan Organisasi Kantor Satuan Polisi Pamong Praja serta Pemerintah Daerah.

BABX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Sepanjang mengenai pelaksanaannya secara teknis akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 18

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Ditetapkan di : Muara Sabak
Pada tanggal : 14 Mei 2004

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR

dto

Drs. H. ABDULLAH HICH

Diundangkan di : Muara Sabak
Pada tanggal : 17 Mei 2004

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

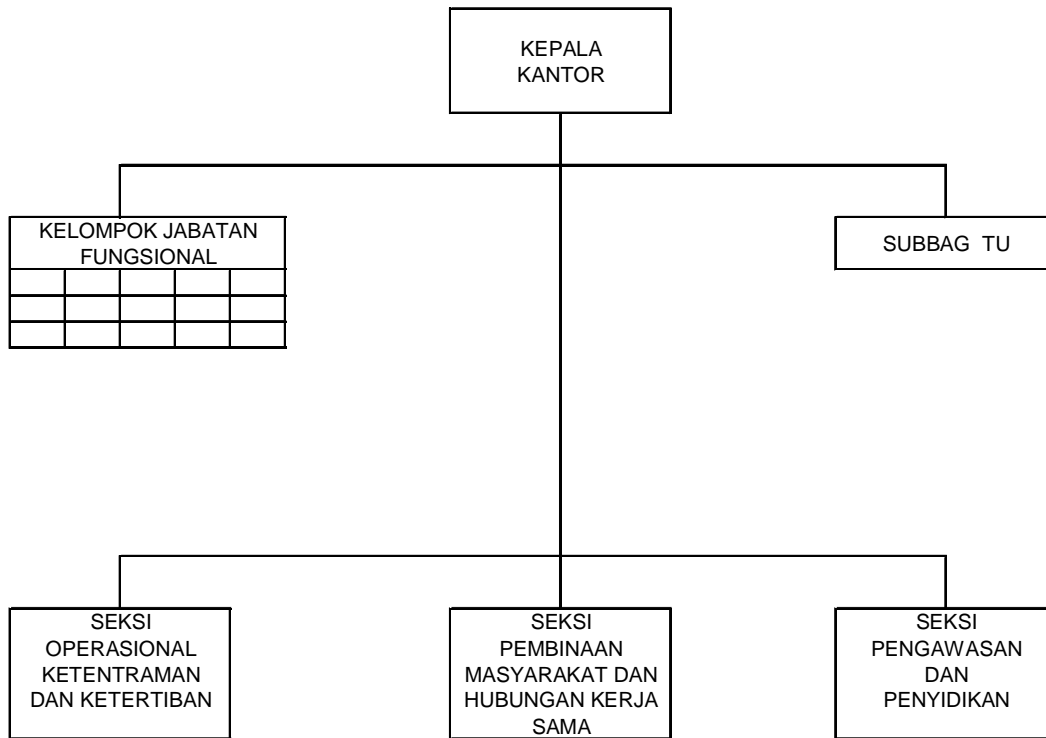
dto

H. SYARIFUDDIN FADHIL

Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2004 Nomor 14 Seri

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN
TANJUNG JABUNG TIMUR
NOMOR : 07 TAHUN 2004
TANGGAL : 14 MEI 2006

**BAGAN ORGANISASI KANTOR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR**



BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR

dto

DRS. ABDULLAH HICH